



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 947/DJU/SK.DL1.10/IV/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PELAYANAN HUKUM DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 dan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/ DJU/ SK/ PS.00/12/ 2020, setiap pengadilan diharapkan mampu memberi akomodasi dan layanan yang layak bagi seluruh penyandang disabilitas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan adanya akomodasi yang layak sehingga penyandang disabilitas terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. bahwa untuk keseragaman pemahaman mengenai pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu disosialisasikan pedoman yang sudah ditetapkan tersebut dalam suatu bimbingan teknis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, b, dan c, maka perlu ditunjuk nama-nama dalam keputusan ini untuk menjadi peserta dalam bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas.



- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
 7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 432/DJU/PS.00/4/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Survei Layanan Disabilitas di Pengadilan Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Peserta dibebaskan tugas dari pekerjaan selama mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 23 s.d 25 April 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-005.03.1.097450/2025 tanggal 2 Desember 2024.



KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.
Pada 10 April 2025



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara



Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor 947/DJU/SK.DL1.10/IV/2025
Tanggal 10 April 2025

**PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025
SECARA LURING**

NO	N A M A	GOL /RG	JABATAN	SATKER
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	DR. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H. NIP. 19741213 199903 2 002	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Balikpapan
2.	AGUS AKHYUDI, S.H, M.H. NIP. 197502121998031005	IV/c	Ketua	Pengadilan Negeri Banjarmasin
3.	BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H. NIP. 19780901 200112 1 002	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Tenggarong
4.	DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum NIP. 19771115 200112 1 002	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Tarakan
5.	BUDI HERMANTO, S.H., M.H NIP. 19751205 200212 1 004	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
6.	JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H., M.H NIP. 19800131 200312 1 003	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
7.	ARI LISTYAWATI, S.H., M.H NIP. 19770321 200312 2 011	IV/b	Ketua	Pengadilan Negeri Tanah Grogot



NO	N A M A	GOL /RG	JABATAN	SATKER
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
8.	HANDRY SATRIO, S.H., M.H NIP. 19800315 200604 1 003	IV/a	Ketua	Pengadilan Negeri Kutai Barat
9.	RAHMAT DAHLAN, S.H NIP. 19780503 200502 1 003	IV/a	Ketua	Pengadilan Negeri Bontang
10.	HENU SISTHA ADITYA, S.H., M.H NIP. 19790524 200502 1 001	IV/a	Ketua	Pengadilan Negeri Sangatta
11.	HARTATI ARI SURYAWATI, S.H. NIP. 19720108 200502 2 002	IV/a	Ketua	Pengadilan Negeri Penajam
12.	NUR IKHLAS, S.E.Ak. NIP. 19720118 200502 1 001	IV/b	Sekretaris	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
13.	HASANUDDIN, S.H. NIP. 19710204 199303 1 004	IV/b	Sekretaris	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
14.	FIRMAN TUPEN LELANG ONA, S.E. NIP. 19801114 200904 1 005	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Samarinda
15.	SYAHRUDDIN, S.E. NIP. 19780627 200904 1 002	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Balikpapan
16.	Pejabat/Pegawai Kejaksaan Negeri Balikpapan			Kejaksaan Negeri Balikpapan
17.	Advokat Posbakum			Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan



**PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025
SECARA DARING**

NO	N A M A	GOL /RG	JABATAN	SATKER
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	RADEN NARENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H. NIP. 19760830 200502 1 001	IV/a	Ketua	Pengadilan Negeri Nunukan
2.	BUDI SANTOSO, S.H NIP. 19751118 200604 1 001	IV/a	Ketua	Pengadilan Negeri Malinau
3.	ABDUL AZIS, S.H. NIP. 19821015 200704 1 001	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Tenggarong
4.	KISWOYO, S.Sos. NIP. 19781029 200604 1 003	IV/a	Sekretaris	Pengadilan Negeri Tarakan
5.	RIZKY RAMA PRAWIRA, S.H. NIP. 19881225 201101 1 003	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Penajam
6.	RIKY ANDRIANTO, S.E. NIP. 19850520 201101 1 009	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Tanjung Selor
7.	TONY SUNARYO, S.sos. NIP. 19830723 200604 1 003	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
8.	SUGIANTO, S.H NIP. 19700705 199303 1 007	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Tanah Grogot
9.	REJEKI SINAGA, S.H. NIP. 19670920 199203 1 002	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Kutai Barat



NO	N A M A	GOL /RG	JABATAN	SATKER
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
10.	RIZA PUTRA PERDANA, S.T. NIP. 19771005 200604 1 005	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Bontang
11.	ARINI WIDIASTUTI, S.IP. NIP. 19740918 200604 2 001	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Sangatta
12.	MUHAMMAD SYAFARUDDIN, S.Kom. NIP. 19850901 200912 1 004	III/d	Sekretaris	Pengadilan Negeri Nunukan
13.	ERMA ANGGRIANI, S.E. NIP. 19850214 200912 2 005	III/c	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Pengadilan Negeri Tanjung Selor

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO



